



Buletin

edisi : 925 / November 2021

ISEN MULANG

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**GUBERNUR KALTENG
HADIRI PENYERAHAN DIP
DAN TKDD TAHUN 2022 DARI
PRESIDEN SECARA VIRTUAL**

5



**WAGUB TANDATANGANI NOTA
KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

8



**GUBERNUR KALTENG
GELAR RAKOR PENANGANAN
BANJIR BERSAMA KEPALA BNPB**

**GUBERNUR SUGIANTO
SABRAN HADIRI MUSDA III
DAD PROVINSI KALTENG**

18



**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan pada
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya Sri Saryanta, Noriko Yunanto

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana,
Winda Paskanova, Renny Patrisia,
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Kamala Sri Yadikawati Rasan.

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI :

GUBERNUR KALTENG GELAR RAKOR PENANGANAN BANJIR BERSAMA KEPALA BNPB_____	3
GUBERNUR KALTENG HADIRI PENYERAHAN DIPADAN TKDD TAHUN 2022 DARI PRESIDEN SECARA VIRTUAL_____	5
GUBERNUR SUGIANTO SABRAN LANTIK PEJABAT PEMPROV KALTENG_____	6
WAGUB EDY PRATOWO HADIRI RAKOR EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2021_____	7
WAGUB TANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH_____	8
WAGUB EDY PRATOWO SAMPAIKAN PIDATO PENGANTAR GUBERNUR TERKAIT NOTA KEUANGAN DAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022_____	8
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH NURYAKIN IKUTIRAKOR PERCEPATAN REFORMA AGRARIA UNTUK KALTENG, KALSEL, DAN KALBAR_____	10
WAGUB EDY PRATOWO SAMPAIKAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI_____	11
PJ. SEKDA HADIRI RAPAT GABUNGAN BANGGAR DPRD DAN TAPD KALTENG BAHAS RAPBD TA 2022_____	12
PJ. SEKDA BUKA RAKOR JAJARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SE-KALTENG_____	13
WAGUB HADIRI UPACARA ZIARAH DAN TABUR BUNGA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TINGKAT PROVINSI KALTENG TAHUN 2021_____	14
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN BANGUN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT_____	14
WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO BUKA PELATIHAN KADER PMII KALTENG_____	15
WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO HADIRI SENAM BERSAMA DAN VAKSINASI MERDEKA_____	16
TIGA HAL PICU KENAIKAN TREN KASUS POSITIF COVID-19_____	17
GUBERNUR SUGIANTO SABRAN HADIRI MUSDA III DAD PROVINSI KALTENG_____	18
FOTO-FOTO KEGIATAN PEMPROV. KALTENG_____	19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Biro Adminidtrasi Pimpinan Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

Website : <http://biroadpim.kalteng.go.id/>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instragram : @sekretariat.daerah.kalteng

email : buletin.isenmulang@gmail.com

GUBERNUR KALTENG GELAR RAKOR PENANGANAN BANJIR BERSAMA KEPALA BNPB

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Sugianto Sabran, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Sabtu (20/11/2021).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran mengimbau kepada Bupati/Wali Kota untuk menyampaikan secara terbuka permasalahan terkait banjir di daerahnya dalam Rakor kali ini agar menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Gubernur menyontohkan mengenai pendangkalan sungai yang dapat diakibatkan oleh proses penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) atau sawit di sekitar bantaran sungai yang tidak memperhatikan “ekosistem” hayati. Untuk itu, Gubernur pun meminta agar perizinan terkait HTI ditinjau ulang atau tidak terlalu mudah dikeluarkan. Gubernur juga meminta pembangunan rumah dan jembatan memperhatikan kondisi wilayah dan tinggi permukaan air saat musim hujan.

“Yang terakhir, komitmen kita, Bupati/Wali Kota, untuk tidak keluar daerah ketika mengeluarkan surat tanggap darurat sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai kepala daerah,” tegas Gubernur Sugianto Sabran.

Sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam sambutan pengantar, banjir kali ini terjadi di 6 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Barito Selatan. Sebanyak 4 Kabupaten/Kota sudah menetapkan status tanggap darurat, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Status tanggap darurat ini sudah disepakati dalam Rakor yang digelar pada 19 November 2021.

Wagub Edy Pratowo menekankan kepada Kabupaten/Kota agar menyiapkan anggaran minimal 5% untuk penanganan bencana, khususnya banjir, yang terjadi hampir setiap tahun di Kalteng. “Anggaran ini harus benar-benar dipersiapkan dan dibedakan dengan anggaran penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto dalam sambutan sekaligus arahnya menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah



Daerah. “BNPB merupakan pengejawantahan dari pola-pola penanganan apabila terjadi bencana di samping daerah akan melaksanakan tahap-tahap penanganan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa banjir kali ini, selain disebabkan curah hujan yang tinggi akibat fenomena alam La Nina, juga dapat disebabkan daya dukung alam dan lingkungan untuk menerima air yang sudah tidak sama seperti dulu. “Ini juga harus kita cermati dan sadari bersama,” ujarnya.

Kepala BNPB pun meminta aparat pemerintah, seperti ASN, TNI, dan Polri atau stakeholder utama lainnya untuk segera turun ke lapangan apabila terjadi banjir guna mencegah adanya korban jiwa dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi

“Kami paham daerah tidak akan sebesar Pusat kemampuannya, makanya kita datang ke sini ingin tahu apa yang sudah dilakukan dan apa kesulitannya,” jelas Kepala BNPB seraya menambahkan bahwa untuk jangka pendek harus diupayakan agar masyarakat terdampak banjir tidak tambah menderita.

Kemudian, Kepala BNPB berharap kejadian serupa (banjir) tidak kembali terjadi di tahun 2022. “Target jangka menengah juga diupayakan. Kami akan melakukan pendampingan dalam membentuk atau melakukan kegiatan agar kejadian ini tidak terjadi di tahun depan,” kata Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto yang berencana menggandeng kementerian-kementerian terkait untuk membantu penanganan banjir di Kalteng.

Terkait Food Estate, Kepala BNPB meminta Pemerintah Daerah turut berupaya menangani isu



negatif yang menyebut bahwa banjir terjadi akibat deforestasi Program Strategis Nasional ini. Sementara terkait penanganan Covid-19, Kepala BNPB mengingatkan bahwa disiplin protokol kesehatan memakai masker tetap harus dijalankan meskipun menjaga jarak dan selalu mencuci tangan sulit dijalankan di lokasi pengungsian korban banjir.

Menutup sambutannya, Kepala BNPB berharap banjir segera teratasi di Kalteng, langkah-langkah rekonstruksi dan rehabilitasi bisa dilaksanakan dengan baik, serta kejadian serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang. “Untuk jangka panjang, mohon dievaluasi lagi kebijakan-kebijakan terkait lingkungan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” imbaunya.

Agenda sore ini merupakan bagian dari rangkaian acara kunjungan kerja Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto di Bumi Tambun Bungai pada 20-21 November 2021. Sebelumnya, Kepala BNPB yang baru saja dilantik pada 17 November 2021 ini tiba di Palangka Raya Sabtu (20/11/2021) siang selepas meninjau banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kedatangan Kepala BNPB dan rombongan disambut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwet Palangka Raya.

Tampak hadir dalam rombongan Kepala BNPB, antara lain Deputy II BNPB, Deputy III sekaligus Deputy V BNPB, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, serta Kepala Pusat Meteorologi BMKG.

Sementara itu, tampak hadir secara langsung dalam

Rakor di Aula Jayang Tingang, antara lain Danrem 102/ Panju Panjung Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Kabinda Kalteng Brigjen TNI Sinyo, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi, dan Mewakili Kajati Kalteng.

Selain itu, tampak hadir pula Pj. Sekda Nuryakin, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang, Bupati Katingan Sakariyas, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Erlin Hardi, Kalaksa BPBD Palangka Raya Emi Abriyani, Kalaksa BPBD Kabupaten Pulang Pisau Salahudin, Kalaksa BPBD Kabupaten Katingan Roby, serta Kalaksa BPBD Kabupaten Kapuas Panahatan Sinaga.

Kegiatan yang juga dihadiri secara virtual oleh para Bupati, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Kepala Perangkat Daerah terkait se-Kalteng ini dirangkai dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto kepada Wali Kota Palangka Raya, Bupati Pulang Pisau, dan Bupati Katingan, masing-masing berupa bantuan logistik, peralatan, dan dana siap pakai senilai Rp 500 juta. Bantuan juga diserahkan secara simbolis kepada Plt. Kalaksa BPBPK Provinsi Kalteng dan Kalaksa BPBD Kabupaten Kapuas, masing-masing berupa bantuan logistik dan peralatan.

Esok hari, Minggu (21/11/2021), Kepala BNPB dan rombongan dijadwalkan meninjau banjir di beberapa titik di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau. (ran/sop/ben/dmr).

GUBERNUR KALTENG HADIRI PENYERAHAN DIPA DAN TKDD TAHUN 2022 DARI PRESIDEN SECARA VIRTUAL



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 secara virtual melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Senin (29/11/2021).

Tampak hadir mendampingi Gubernur Kalteng mengikuti kegiatan penyerahan DIPA tersebut, di antaranya Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, serta Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Arsyad.

Penyerahan secara virtual DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 ini sendiri dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta. Presiden tampak didampingi, antara lain oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim, dengan ini saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam arahannya.

Kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah se-Indonesia, Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu mengingatkan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 yang pada tahun 2022 masih menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Presiden pun meminta agar berbagai langkah antisipasi dan mitigasi disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga

tata kelola yang baik,” pinta Presiden Joko Widodo.

Presiden kemudian mengatakan bahwa APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral. Presiden mengharapkan, sebagai presidensi G20, Indonesia dapat menunjukkan aksi nyata dan komitmen pada green dan sustainable economy. Presiden juga berharap APBN 2022 bisa membangkitkan perekonomian. “APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural,” harap Presiden.

Presiden selanjutnya menegaskan 6 fokus kebijakan utama di tahun 2022. Pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Di akhir arahan, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa ancaman pandemi harus diantisipasi dengan sebaik mungkin. “Sekali lagi, di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita, Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pungkas Presiden. (set/eka).



GUBERNUR SUGIANTO SABRAN LANTIK PEJABAT PEMPROV KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melantik dan mengambil Sumpah Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Selasa (30/11/2021) sore.

Pelantikan para pejabat Pemprov Kalteng tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/446/2021 Tanggal 30 November 2021. Adapun jumlah pejabat yang dilantik oleh Gubernur Sugianto Sabran adalah sebanyak 46 orang dan pada kesempatan tersebut juga sekaligus dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) kepada 26 orang pejabat.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam acara pelantikan tersebut, yaitu Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin.

Dalam laporannya, Pj. Sekda Nuryakin menyampaikan rincian jumlah pejabat Pemprov Kalteng yang dilantik sore itu. “Adapun pejabat yang dilantik pada hari ini adalah sebagai berikut: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 10 orang, Pejabat Administrator sebanyak 29 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 7 orang, sekaligus penyerahan SK. Plt. sebanyak 26 orang,” ucap Pj. Sekda Nuryakin.

Pelantikan sejumlah pejabat di Lingkungan Pemprov Kalteng tersebut merupakan pelantikan pertama yang dilakukan oleh Gubernur Sugianto Sabran dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo sejak dilantik pada 25 Mei 2021. “Dapat kami sampaikan bahwa pelantikan pada hari ini, Selasa, 30 November 2021, adalah pelantikan pertama dalam pemerintahan Bapak Gubernur H. Sugianto Sabran dan Bapak Wakil Gubernur H. Edy Pratowo,” terang Pj. Sekda Nuryakin.

Dijelaskannya juga bahwa maksud dari pelantikan ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, Pj. Sekda Nuryakin juga menyebutkan bahwa tujuan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional Lingkungan Pemprov Kalteng ini, antara lain sebagai



pengembangan dan pembinaan SDM, penyegaran iklim kerja, dan menghilangkan kejenuhan melalui mutasi agar selalu terwujud prestasi kinerja menuju masyarakat Kalteng yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Sementara itu, usai melantik para pejabat Pemprov Kalteng, Gubernur Sugianto Sabran dalam menyampaikannya meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik tersebut untuk dapat melakukan terobosan dan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diamanahkan. “Membangun Kalteng diperlukan pejabat yang mampu menciptakan inovasi dan terobosan besar dan luar biasa, tidak cukup dengan langkah yang biasa-biasa saja. Pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi 6 bulan ke depan, apakah mampu atau tidak,” tegas Gubernur Kalteng Sugianto.

Dalam sesi jumpa pers setelah acara, di hadapan para awak media, Gubernur Kalteng menjelaskan bahwa penyegaran dalam organisasi adalah hal yang lumrah dengan memperhatikan kinerja para pejabat. “Sebetulnya dalam organisasi, penyegaran itu dilihat dari kinerjanya. Yang lama pun bagus, tapi kita ingin lebih kerja keras lagi untuk melayani Kalteng dan masyarakatnya. Maka dari itu, banyak kepala dinas masih berumur di bawah 50 tahun supaya mereka mau berinovasi, kreatif, mau berpikir, selain menghabiskan anggaran yang terpenting adalah mencari anggarannya,” kata Gubernur Kalteng.

Gubernur juga mengemukakan bahwa pejabat yang telah dilantik kemudian dinilai dan dievaluasi. Dan, apabila kinerja yang dilakukan tidak baik, Gubernur akan tegas mengganti pejabat tersebut. “Sesuai dengan Pakta Integritas yang ditandatangani Gubernur dengan pejabat yang dilantik, akan ada penilaian juga sebagai pengawasan di lingkungan kepegawaian. Kalau 3 bulan, 6 bulan tidak menunjukkan kinerja yang baik, ya, kita mengganti, mencari yang benar-benar mau membangun Kalteng dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat itu penting, banyak Lansia, anak yatim piatu yang tidak terurus semuanya, makannya susah, dan kita harus hadir, dan memang amanat UUD 1945,” pungkas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (renn/win/dmr).

WAGUB EDY PRATOWO HADIRI RAKOR EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2021

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (22/11/2021).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sementara, mendampingi Wagub Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin, Plt. Inspektur Saring, dan Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat.

Rakor digelar guna menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam mempercepat realisasi penyerapan anggaran di daerah untuk Tahun Anggaran 2021. Rakor juga digelar untuk memberikan gambaran mengenai hasil evaluasi realisasi penyerapan anggaran di daerah per 19 November 2021.

Mengutip pidato Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Paripurna, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutan sekaligus arahannya menyampaikan bahwa ada target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. “Ada target untuk pertumbuhan ekonomi kita yang di awal tahun terdampak akibat pandemi, -0,71% kuartal pertama, kemudian naik 0,7% di kuartal kedua, kemudian 3,51%, dan target 5% di akhir tahun,” papar Mendagri.

Menurutnya, Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diwaspadai atau diantisipasi dan menjadi masukan dalam menghadapi tahun 2022, di antaranya dampak perkembangan ekonomi global terhadap proyek pembangunan Indonesia, risiko-risiko akibat masalah iklim, green economy, dan dampak pandemi Covid-19 yang masih bisa terjadi meskipun kasus di Indonesia kini sudah melandai.

“Kemudian, Bapak Presiden juga menekankan masalah kemudahan investasi iklim usaha yang harus kompak antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah,” imbuhnya.

Mendagri menyadari bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan di tahun 2021 yang masih berada pada masa pandemi Covid-19. “Tahun 2020, pendapatan berada di atas 85,86% per 30 November 2020. Kemudian, data kita per tanggal 19 November 2021, pendapatan gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 79,19%,” jelas Mendagri.

Mendagri pun mengungkapkan Provinsi yang realisasi pendapatan daerahnya per tanggal 19 November 2021 mencapai di atas 80%, yaitu Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Banten, dan Sumatera Barat. Kemudian, Provinsi yang mencapai realisasi pendapatan 70%-79%, yaitu Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat. Untuk 3 Provinsi sisanya, capaian realisasi pendapatan berada di bawah 70%.

Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah untuk melakukan Rakor internal. “Sisir betul program-program mana yang bisa dieksekusi sesuai dengan aturan. Kemudian, untuk Rekan-rekan, Bapak/Ibu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, tolong laksanakan dalam minggu ini Rakor Provinsi,” tegasnya.

Terkait penanganan Covid-19, Mendagri mengimbau Pemerintah Daerah melakukan survei serologi untuk mengetahui persentase masyarakat yang memiliki antibodi karena antibodi bisa keluar dari vaksinasi dan dari infeksi alami. Survei tingkat nasional dapat menjangkau hingga Kabupaten/Kota, sedangkan survei di daerah dapat menjangkau hingga tingkat Kecamatan. “Daerah yang tingkat antibodinya masih rendah bisa melakukan pengetatan kegiatan masyarakat dan percepatan vaskinasi,” imbau Mendagri.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19. “Ini merupakan sebuah tahun yang tidak biasa meski kita berhasil menurunkan kasus akibat dari kenaikan varian Delta. Namun, tidak berarti kita kemudian terlena karena kita melihat di negara-negara terutama di Eropa kemudian bahkan di Amerika dan RRC juga terjadi kenaikan dari kasus yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan beberapa pengetatan kebijakan ekonomi dan kegiatan masyarakat,” terangnya.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), menurut Menkeu, Presiden berpesan agar semua pihak tetap waspada. “Untuk beberapa daerah, meskipun kenaikan kasus Covid-19 sangat kecil, harus segera ditangani karena kita tidak ingin kemudian terjadi kenaikan menjelang Nataru atau sesudah Nataru,” tegas Menkeu.

Terkait Tahun Anggaran 2021 yang tinggal sekitar 1 bulan lebih 1 minggu, Menkeu berpesan kepada daerah agar segera menggunakan APBD untuk ikut mendorong perekonomian. “Dan, untuk tahun 2022, kami berharap APBD bisa disiapkan dengan perencanaan lebih baik sehingga tahun depan TKDD akan mencapai Rp 769 triliun, akan bisa direalisasi setiap bulannya untuk mendorong ekonomi di daerah,” pungkasnya. (ran/sop/dmr).

WAGUB TANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKARAYA–BIROADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, Selasa (02/11/2021) secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur.

Agenda Rapat Paripurna Dewan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Faridawaty Darland Atjeh ini adalah Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan KUA, Rancangan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, dan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak 2022-2024.

Pada kesempatan ini, Wagub Edy Pratowo melakukan penandatanganan atas nama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, yaitu 3 buah Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, serta tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Tahunan Jamak 2022-2024.

“Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah hasil pembahasan bersama dan sekaligus sebagai wujud nyata dari kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Gubernur dalam pidato yang dibacakan



Wagub Kalteng.

Lebih lanjut disampaikan, secara umum target/sasaran indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, antara lain: 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,5 persen; 2) Laju inflasi 2,5-3 persen; 3) Angka kemiskinan sebesar 4,43-4,2 persen; 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,9-4,1 persen; 5) Gini Rasio sebesar 0,228; dan 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72.

“Saya mengapresiasi kinerja seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas sinergi dan kolaborasi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang secara proaktif mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkas Gubernur melalui Wagub Edy Pratowo.

Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna ini, yakni Pj. Sekretaris Daerah Nuryakin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Hamka, Plt. Inspektur Saring, serta Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat. (win/renn).

WAGUB EDY PRATOWO SAMPAIKAN PIDATO PENGANTAR GUBERNUR TERKAIT NOTA KEUANGAN DAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 secara virtual dari Ruang Rapat Wagub di Lantai I Kantor Gubernur, Senin (8/11/2021) malam.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak ini mengagendakan penyampaian

Pidato Pengantar Gubernur Kalteng terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2022.

Membacakan pidato Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Wagub Edy Pratowo menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 secara langsung ikut berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program kegiatan dan realisasi pendapatan sepanjang tahun anggaran 2021

yang berjalan dengan kurang maksimal dikarenakan masih terbatasnya kegiatan masyarakat, sebagai pengaruh dari pembatasan beberapa wilayah serta pola konsumsi masyarakat. Dan, hal ini diprediksi masih akan terus berlanjut sampai tahun depan.

Berdasarkan dampak langsung Covid-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kebijakan anggaran Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid-19, pemutakhiran kodefikasi, serta nomenklatur program kegiatan pendapatan dan belanja daerah, maka terjadi penyesuaian pada beberapa program kegiatan yang sebelumnya dirancang selaras dengan RPJMD Tahun 2022-2026. Di mana, pada APBD Tahun Anggaran 2022, masih berfokus pada penuntasan penanganan Covid-19, beberapa program prioritas, dan urusan wajib daerah Provinsi Kalteng sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.

Gubernur Kalteng, sebagaimana disampaikan Wagub Edy Pratowo menekankan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian serta lebih fokus kepada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara luas.

Lebih lanjut dikatakan, fokus pembangunan infrastruktur pada periode kedua masa kepemimpinan ini akan melanjutkan kembali proyek strategis Multi Years yang meliputi pembangunan beberapa ruas jalan di Kabupaten/Kota se-Kalteng, dengan perkiraan biaya Rp 2,1 triliun melalui skema pembayaran bertahap dimulai dari tahun anggaran 2022 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

Di bidang kesehatan, fokus utama dari penganggaran belanja APBD adalah sebagian besar untuk penanganan pandemi Covid-19 dan proses penerapan protokol kesehatan yang selaras dengan kebijakan PPKM Pemerintah Pusat serta penuntasan program vaksinasi untuk masyarakat umum dan tenaga medis.

Sementara, pada bidang sosial ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalteng aktif mendorong pelaku usaha dan masyarakat terdampak langsung pandemi Covid-19, dengan bantuan usaha permodalan maupun bantuan hibah yang bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Kalteng.

Berkaitan dengan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2022,

Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen akan terus memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan perusahaan daerah, yaitu dengan tetap memberikan dukungan dana penyertaan modal, salah satunya kepada Bank Kalteng dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021, untuk penguatan modal yang dianggarkan sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 523 miliar yang mana pada tahap kedua pada Tahun Anggaran 2022 untuk penyertaan modal Bank Kalteng dianggarkan sebesar Rp 130,6 miliar.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3037/Polpum tentang Dukungan Anggaran Pilkada dan Pemilu Tahun 2024, dalam rangka penyediaan dana secara bertahap untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, maka mulai anggaran 2022-2024 akan dianggarkan pembentukan dana cadangan dalam rangka Pilkada pada komponen Pembiayaan Daerah, yaitu sebesar Rp 150 miliar setiap tahunnya selama 3 tahun.

Gubernur melalui Wagub Edy Pratowo menyampaikan rincian proyeksi struktur dan volume penganggaran APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2022, di mana Pendapatan Daerah senilai Rp 4,667 triliun; Belanja Daerah senilai Rp 4,621 triliun dengan Surplus/Defisit senilai Rp 45,5 miliar; Penerimaan Pembiayaan senilai Rp 235 miliar dengan SiLPA senilai Rp 235 miliar; dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 280,6 miliar dengan Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp 150 miliar, Penyertaan Modal senilai Rp 130,6 miliar, dan Pembiayaan Netto senilai Rp 45,5 miliar.

Belanja Daerah Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2022, dengan beberapa perubahan mengikuti kondisi sosial masyarakat saat ini, akan tetap diarahkan pada pemenuhan urusan wajib pada bidang-bidang tertentu yang sudah diamanatkan dalam undang-undang serta beberapa program prioritas pembangunan. "Di antaranya ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang disertai penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik guna terciptanya sistem pelayanan publik yang berkualitas," tegas Gubernur dalam pidato yang dibacakan Wagub Edy Pratowo.

Tampak hadir mendampingi Wagub di ruang rapat malam ini, antara lain Plt. Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Andy Arsyad, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, serta Kepala Dinas TPHP Sunarti. Sementara tampak hadir pula secara virtual, antara lain Kajati Kalteng Iman Wijaya, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, dan Plt. Inspektur Saring. (ran/sop/dmr).

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH NURYAKIN IKUTI RAKOR PERCEPATAN REFORMA AGRARIA UNTUK KALTENG, KALSEL, DAN KALBAR

PALANGKA RAYA
– BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Reforma Agraria untuk Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar) di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Selasa (9/11/2021).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Saat membuka secara resmi rapat koordinasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

“Bapak/Ibu sekalian, rapat koordinasi kita pada hari ini dilatarbelakangi oleh reforma agraria sebagaimana telah ditekankan berkali-kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang terakhir ini adalah pada rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional di tanggal 29 Mei 2020,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan perlu komitmen bersama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempercepat reforma agraria.

“Perlu adanya komitmen dari kita semua, Bapak/



Ibu sekalian, koordinasi dari Pusat, Kementerian/Lembaga, dan juga dari Daerah, baik Provinsi/Kabupaten dan Kota untuk mempercepat legalisasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo.

Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin berharap dengan adanya reforma agraria ini bisa menjadi solusi

terkait kepemilikan lahan, sehingga tanah yang dimiliki dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita, dengan adanya reforma agraria ini, bisa mengurangi ketimpangan sosial dan kepemilikan lahan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” kata Penjabat Sekretaris Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin mengatakan bahwa reforma agraria sangat sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Jadi, kita sangat berharap bahwa tujuan reforma agraria ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, maka akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui percepatan sertifikasi hak atas tanah,” jelasnya.

Tampak hadir pada acara tersebut, di antaranya Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dodi Slamet Riyadi, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herban Heryanda, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah Elijas Tjahajadi, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (rik/bow).

WAGUB EDY PRATOWO SAMPAIKAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

PALANGKA RAYA – BIRO UMUM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun 2021 secara virtual dari Ruang Rapat di Lantai I Kantor Gubernur, Rabu (10/11/2021).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak ini mengagendakan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2022.

Membacakan Jawaban Gubernur Kalteng, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran masukan Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng terhadap Raperda APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2022.

Menanggapi saran masukan tersebut, diungkapkan Wagub, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah melakukan dan menyiapkan sejumlah langkah yang meliputi bidang kesehatan khususnya terkait penanganan Covid-19, bidang pendidikan termasuk kegiatan pembelajaran jarak jauh dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik/kependidikan, bidang sosial ekonomi terkait dampak pandemi Covid-19, serta bidang infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan akses antar Kabupaten/Kota dan mendukung peningkatan perekonomian di seluruh wilayah Provinsi Kalteng.

Terkait penanganan pandemi Covid-19, ditegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah mengambil berbagai kebijakan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut diutamakan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak sosial dan ekonomi. Pemprov Kalteng juga telah menyiapkan tatanan baru pemerintah menuju new normal serta sejumlah langkah antisipasi, seperti melakukan upaya penegakan diagnosis melalui uji laboratorium, mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 dan kepatuhan pada protokol kesehatan 5M, serta memperbanyak testing dan tracking.

Menanggapi kondisi pembelajaran pada masa pandemi, Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan berupaya menjembatani proses belajar mengajar dengan Video Based Learning (VBL) serta meluncurkan GEMAR (Gerakan Mengajar Daring), KIBAR (Kita Berbagi Daring), dan SI-BAJAKAH (Sistem Belajar Jarak Jauh Kalimantan Tengah Berkah).

Sementara untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari DAK Fisik dan PAD untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan, memprogramkan Bantuan Operasional

Pendidikan Kalteng Berkah untuk Satuan Pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemprov, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan Bimtek, serta memberikan bantuan peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru.

Terkait pengentasan kemiskinan masyarakat terdampak Covid-19, disampaikan Wagub bahwa sasaran pengentasan kemiskinan bersumber pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemprov Kalteng pun senantiasa mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk selalu melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin di Provinsi Kalteng mendapat peluang untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial PKH maupun BPNT dari Pemerintah Pusat.

“Diharapkan (di) tahun 2022, terbuka kembali lapangan kerja baru untuk perluasan kesempatan kerja. Selain itu, dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap Industri Kecil Menengah, melaksanakan program e-Smart IKM/UKM, serta dengan program pasar penyeimbang,” ungkap Wagub masih terkait penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19 yang juga akan berfokus pada kemajuan perekonomian masyarakat lokal dan penguatan kelembagaan BUMDes.

Berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Pemprov Kalteng menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Untuk itu, Pemprov Kalteng terus berupaya meningkatkan penerimaannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan program strategis Pemprov Kalteng, Wagub menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan program kegiatan tahun jamak (Multi Years) ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penataan pembangunan serta mempercepat pembangunan di daerah, dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan daerah, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kegiatan infrastruktur jalan tidak hanya dilakukan dengan sistem MYC, tetapi juga dengan kegiatan reguler di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” imbuh Wagub Edy Pratowo membacakan tanggapan Gubernur Kalteng.

Poin selanjutnya berkaitan dengan dana cadangan Pemilukada Serentak Tahun 2024. Dalam hal ini, Pemprov Kalteng menganggarkan dana Rp 150 miliar per tahun selama 3 tahun. Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk KPU, Bawaslu,

Polda, dan Korem sebagaimana Pemilukada Serentak Tahun 2020, termasuk pengadaan APD dan protokol kesehatan, walaupun pada Pemilukada 2024 terdapat dana sharing dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian, terkait turunnya Pendapatan Transfer, disampaikan Wagub bahwa penurunan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan melemahnya ekonomi secara nasional sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan penurunan bantuan hibah kepada masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya, disebabkan adanya refocusing dan efisiensi anggaran.

Pada kesempatan kali ini, Wagub juga menyampaikan upaya-upaya Pemprov Kalteng untuk pembangunan industri strategis yang sumber dayanya berasal dari alam bumi Kalteng, peningkatan cadangan

pangan, penguatan usaha masyarakat di sektor riil seperti pengelolaan hasil panen komoditas perkebunan karet, penyelesaian masalah Perkebunan Sawit Swasta yang belum melaksanakan kewajiban 20% untuk plasma bagi masyarakat dan program peremajaan/replanting, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bercocok tanam dan program kerja untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan.

Tampak hadir mendampingi Wagub di ruang rapat, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Asisten III Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah, Plt. Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Andy Arsyad, Plt. Inspektur Saring, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, serta Plt. Kepala Biro Kesra Aryawan. Rapur kali ini sendiri diikuti 28 peserta, baik yang hadir secara langsung di Gedung Dewan maupun yang hadir secara virtual dari tempat masing-masing. (ran/dmr).

PJ. SEKDA HADIRI RAPAT GABUNGAN BANGGAR DPRD DAN TAPD KALTENG BAHAS RAPBD TA 2022

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin hadir dalam rapat gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (22/11/2021) sore.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno dan beragendakan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 antara Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Kalteng, termasuk dalam kaitannya dengan penambahan pendapatan yang pada akhirnya mengubah struktur RAPBD TA 2022. Pokok pembahasan rapat gabungan, yakni penjelasan rincian nilai program dan kegiatan yang berada pada masing-masing perangkat daerah sesuai pada indikatif masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda Nuryakin selaku Ketua TAPD Provinsi Kalteng berkesempatan memaparkan struktur pendanaan RAPBD TA 2022. "Perlu kami sampaikan bahwa terjadinya perubahan struktur berkaitan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Kalteng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Pemerintah Daerah khususnya Gubernur/Wakil Gubernur (Wagub) mendorong APBD kita diupayakan selalu meningkat, sehingga beliau (Gubernur/Wagub) ingin kita bekerja lebih maksimal lagi," ungkapnya.

Adapun struktur pendanaan itu sendiri, terdiri dari



komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya, Pj. Sekda Nuryakin juga menyampaikan pagu masing-masing SKPD lingkup Pemprov Kalteng. "Ada beberapa efisiensi yang dilakukan sesuai petunjuk dari Bapak Gubernur terhadap beberapa kegiatan yang di beberapa OPD," jelas Pj. Sekda.

Usai paparan, sejumlah tanggapan dikemukakan anggota Banggar DPRD Kalteng. Tanggapan tersebut, antara lain perlu diadakan rapat antara komisi-komisi dan mitra kerjanya, yakni OPD yang mengalami peningkatan pagu anggaran secara signifikan. Begitu juga OPD yang mengalami efisiensi/pengurangan pagu anggaran secara signifikan. Di dalam rapat-rapat tersebut akan didalami apa saja rincian komponen yang mengalami penambahan yang belum tampak pada paparan rapat gabungan sore ini.

Hadir dalam rapat gabungan, sejumlah anggota Banggar, kelompok pakar pimpinan, dan kelompok pakar Banggar DPRD. Sedangkan Pj. Sekda Nuryakin didampingi, antara lain Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaspinor, dan Kepala OPD terkait lainnya. (dew/dmr).

PJ. SEKDA BUKA RAKOR JAJARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SE-KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota se-Kalteng yang digelar di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Selasa (2/11/2021).

Rakor ini mengangkat tema “Sinkronisasi, Integrasi Program dan Kegiatan di Bidang Kesbangpol dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Bumi Pancasila Kalteng” serta diikuti oleh para Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris Badan Kesbangpol, dan para pejabat yang membidangi perencanaan pada Badan Kesbangpol di Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Adapun tujuan digelarnya Rakor ini, antara lain difokuskan untuk membahas, memantapkan, serta mensinkronisasikan indikator program dan kegiatan pada bidang Kesbangpol yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalteng. Selain itu, Rakor ini bertujuan untuk membuka komunikasi dan koordinasi dalam rangka mencegah perkembangan paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Selanjutnya, Rakor juga bertujuan memetakan dan mendeteksi secara dini isu-isu strategis yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta berpotensi dapat memicu konflik sosial dan konflik kepentingan atau permasalahan keamanan dan ketertiban yang mengarah pada gangguan, hambatan, dan tantangan di Kalteng.

“Persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini adalah adanya bahaya disintegrasi bangsa yang disebabkan praktek ujaran kebencian, berita hoax,

dan isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ucap Pj. Sekda membuka sambutannya.

Berbagai gejala tersebut dinilai sangat meresahkan dan merusak budaya demokrasi yang selama ini telah berkembang dengan baik di Indonesia dan Kalteng pada khususnya.

“Karena itu, melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengharapkan dan mengimbau agar jangan mudah terpancing berbagai berita maupun isu-isu yang tidak jelas. Hendaknya kita semua dapat menyaring berbagai informasi yang masuk secara bijaksana, biasakan diri melakukan kroscek terhadap suatu opini, jangan justru kita ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya,” harap Pj. Sekda.

Ia pun mengimbau para ASN agar menyaring semua informasi yang berkembang, membangun negeri dengan inovasi, kreativitas, dan berkinerja dengan baik.

Secara khusus, Pj. Sekda Nuryakin mengharapkan, melalui forum Rakor ini, terwujud koordinasi, sinkronisasi yang baik dari semua pihak khususnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan Kesbangpol. “Program kerja harus terukur dan fokus pada satu tujuan untuk menciptakan dan merajut kejayaan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan dengan situasi aman, nyaman guna mewujudkan Kalteng yang semakin maju dan bermartabat,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Pj. Sekda, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka serta Plt. Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng Katma F. Dirun. Sementara itu, narasumber yang dihadirkan, antara lain dari Kepolisian Daerah Kalteng, Badan Intelijen Negara Kalteng, dan Kepala Kesbangpol Kalteng. (dew/sop/dmr).



WAGUB HADIRI UPACARA ZIARAH DAN TABUR BUNGA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TINGKAT PROVINSI KALTENG TAHUN 2021

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo menghadiri Upacara Ziarah dan Tabur Bunga dalam Rangka Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2021 di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 Palangka Raya, Selasa (10/11/2021).

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara, yakni Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Yudianto Putrajaya. Selanjutnya, diisi dengan pembacaan doa dan tabur bunga di atas makam para pahlawan.

“Momentum ini kita jadikan penyemangat spirit kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan terutama bagi generasi muda supaya mengembangkan kreasi inovatif di dalam mengisi pembangunan di Kalimantan

Tengah. Nilai pahlawan di mata masyarakat harus terus disampaikan kepada anak-anak sekolah melalui kurikulum sekolah, pentingnya untuk mengetahui pahlawan nasional di Kalimantan Tengah untuk menumbuhkan jiwa nasional dan patriotisme serta semangat para pahlawan yang telah berjuang dan gugur mendahului kita,” kata Wagub dalam petikan wawancaranya dengan media dan Humas Pemprov Kalteng.

Turut mendampingi Wagub Kalteng, antara lain Pj. Sekda Nuryakin dan Asisten I Hamka, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, seperti Kasatpol PP, Plt. Kadis Sosial, Plt. Kaban Kesbangpol, dan Plt. Kadis Pendidikan. Tampak hadir pula Wakapolda Kalteng, Wakajati Kalteng, serta Hakim Tinggi dari PTA dan PT setempat. (sop/dmr).

DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN BANGUN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Hamka mengungkapkan bahwa Desa Peduli Pemilu bertujuan membangun kesadaran politik masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Hamka mewakili Gubernur Kalimantan Tengah saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kota Palangka Raya pada Rabu (3/11/2021).

“Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebentar lagi akan diberikan pembekalan dan latihan agar nantinya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat dan penggugah kesadaran politik di masyarakat sekitarnya,” terangnya.

Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu maupun pemilihan menjadi latar belakang pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana ditetapkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 290/PP.06/-Kpt/06/KPU/IV/2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan.

Saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Hamka menyampaikan bahwa pendidikan politik Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 448 Ayat (1), Ayat (2) huruf b, dan Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih, dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berharap Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan meningkatkan pemahaman wawasan dan Partisipasi Masyarakat serta kualitas demokrasi masyarakat di Kalimantan Tengah.

“Saya berharap agar kegiatan ini menjadi sarana silaturahmi yang baik dan menjadi jembatan untuk menciptakan sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten/Kota demi meningkatkan pemahaman, wawasan, dan partisipasi masyarakat, serta kualitas demokrasi masyarakat di Kalimantan Tengah,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah.

Tampak hadir pada acara tersebut, di antaranya Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain, Kepala Biro Pemerintahan Akhmad Husein, Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Indra Wiratama, serta Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahyu. (rik/bow).

WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO BUKA PELATIHAN KADER PMII KALTENG



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mengungkapkan bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng bisa menjadi pelopor pergerakan mahasiswa untuk turut bersinergi membangun Kalteng Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah saat membuka secara resmi acara Pelatihan Kader Lanjut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula BKKBN, Kota Palangka Raya pada Jumat (5/11/2021).

“PMII ini sebagai garda terdepan dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Kalteng khususnya, bisa menjadi media pelopor terdepan memberikan contoh bagi pergerakan mahasiswa dalam rangka ikut membangun Kalimantan Tengah menuju Kalteng Makin Berkah,” terangnya.

Pelatihan Kader Lanjut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalteng tersebut mengangkat tema “Pergerakan Mahasiswa: Kepemimpinan, Kreativitas, dan Ijtihad Kader, Dapat Menjadi Salah Satu Ikhtiar untuk Mewujudkan Kalimantan Tengah Makin Berkah”.

Wakil Gubernur Edy Pratowo mengatakan bahwa organisasi kemahasiswaan memberikan pendidikan kepemimpinan.

“Hidup di organisasi kemahasiswaan memberikan suatu gambaran pendidikan kepemimpinan bagi kita semua. Saya kira beda karakter seseorang yang ikut organisasi dan tidak ikut organisasi,” kata Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, saat menyampaikan sambutan, Wakil Gubernur Edy Pratowo berharap Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalteng bisa memberikan solusi dan bersinergi dengan pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

“Saya berharap PMII Kalteng ke depan semakin mempunyai andil dan peka dalam permasalahan yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga mahasiswa tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga bisa memberikan solusi dan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai hal, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang melanda pada saat ini,” jelasnya.

Saat mengakhiri sambutan, Wakil Gubernur menyambut baik dan mendukung program-program Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalteng.

“Apa yang menjadi program PMII ke depan, kami sangat mendukung. Semoga PMII ke depan makin bagus, semakin berkembang dan terdepan,” ungkap Wakil Gubernur.

Tampak hadir pada acara tersebut, di antaranya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Muhammad Irzal, Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Indra Wiratama, serta Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Abdullah Sukri. (rik/bow).



WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO HADIRI SENAM BERSAMA DAN VAKSINASI MERDEKA



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mengungkapkan bahwa meski kasus Covid-19 di Kalimantan Tengah sudah melandai, protokol kesehatan dan program vaksinasi harus tetap dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat menghadiri kegiatan Senam Bersama dan Vaksinasi Merdeka dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2021 yang digelar di Bundaran Besar, Kota Palangka Raya pada Minggu (7/11/2021).

“Alhamdulillah, puji syukur kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sudah melandai dengan berkurangnya kasus konfirmasi positif, namun kita tidak boleh lengah karena Covid-19 belum benar-benar berakhir, kita harus tetap waspada dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi,” terangnya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak dan menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat luas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan meneladani semangat para pahlawan, yakni semangat berjuang menghadapi pandemi dengan menjadikan budaya sehat dan bugar melalui kegiatan Senam Pagi Bersama dan Vaksinasi Merdeka. Vaksinasi dengan sasaran 1000 orang ini diharapkan mendorong percepatan kekebalan kelompok (herd immunity) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Gubernur Edy Pratowo mengungkapkan bahwa senam

bersama mengajak masyarakat untuk membangkitkan semangat hidup sehat.

“Kegiatan senam bersama dengan protokol kesehatan yang juga dilaksanakan hari ini merupakan langkah untuk membangkitkan kembali semangat pola hidup sehat masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya bagi masyarakat di Kota Palangka Raya,” kata Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Edy Pratowo mengatakan bahwa sosialisasi, edukasi, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan jangan sampai kendur.

“Sosialisasi dan edukasi serta pendisiplinan Prokes kepada masyarakat harus terus kita gencarkan. Jangan sampai kendur, meskipun nanti sudah mendapatkan vaksin. Kita juga berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat melanjutkan pembangunan Kalimantan Tengah untuk dapat terwujudnya Kalimantan Tengah Makin Berkah,” jelasnya.

Saat mengakhiri sambutan, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan bahwa vaksinasi akan memperkuat imunitas dari virus Covid-19.

“Insya Allah, dengan vaksinasi dapat mengurangi tingkat keparahan seseorang apabila terkonfirmasi positif Covid-19,” ungkap Wakil Gubernur.

Tampak hadir pada acara tersebut, di antaranya Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (rik/eka).



TIGA HAL PICU KENAIKAN TREN KASUS POSITIF COVID-19

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagaimana Satgas Penanganan Covid-19 Pusat, Senin (01/11/2021) pukul 15.00 WIB kembali menyampaikan bahwa situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin membaik, tetapi bukan berarti pandemi telah tuntas. Sejumlah indikator, seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR), positivity rate, hingga laju reproduksi efektif (Rt), telah berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, saat ini tren kasus positif di dunia mengalami kenaikan dan dipicu oleh 3 hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan. Kedua, protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi, misalnya kebijakan lepas masker di sejumlah negara. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah.

Tim Satgas menegaskan bahwa protokol kesehatan di sekolah harus dijalankan secara disiplin dan ketat terutama di sejumlah area, seperti kantin dan tempat parkir, di samping diperlukan juga adanya pengawasan lapangan. Manajemen pengawasan lapangan ini sangat diperlukan, sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di Indonesia. Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi dan tetap disiplin protokol kesehatan dengan menerapkan prinsip 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Jumlah akumulasi data pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kalteng bertambah sebanyak 3 orang, dengan total kasus mencapai 46596 orang. Penambahan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 7 orang, dengan total kasus mencapai 44972 orang. Dan, pasien dinyatakan meninggal dunia tidak ada penambahan, sehingga total tetap 1579 orang.

Berikut perkembangan data Covid-19 yang telah dihimpun akumulasinya hari ini pukul 15.00 WIB. Kasus Konfirmasi ada penambahan sebanyak 3 orang, yaitu di Palangka Raya, sehingga dari semula sebanyak 46593 orang menjadi 46596 orang. Sembuh ada penambahan sebanyak 7 orang, yaitu di Palangka Raya 4 orang dan Kotawaringin Barat 3 orang, sehingga dari semula 44965 orang menjadi 44972 orang. Dalam Perawatan ada penurunan sebanyak 4 orang, sehingga dari semula 49 orang menjadi 45 orang. Kasus Meninggal tidak ada penambahan, sehingga tetap 1579 orang, dengan tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) 3,4%. Untuk Keterpakaian

Tempat Tidur pada RS (BOR), Tempat Tidur Intensif tidak mengalami perubahan Tempat Tidur Terpakai (0,0%), sehingga tetap 4,4%, di mana tidak ada Kabupaten/Kota yang BOR di atas 50%, sementara Tempat Tidur Isolasi mengalami penurunan Tempat Tidur Terpakai (0,1%), sehingga dari 3,4% menjadi 3,1%, di mana tidak ada Kabupaten/Kota yang BOR di atas 50%.

Untuk capaian target vaksinasi sebesar 2.036.104, realisasi Vaksinasi Tahap I sebanyak 1.017.702 atau sebesar 49,98% dan Tahap II sebanyak 586.436 atau sebesar 28,80%. Sedangkan untuk capaian vaksinasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, SMA, serta SMK Sederajat, realisasi Vaksinasi PNS/GTT/PTT sebanyak 6.258 atau sebesar 79,01%, Dosis I SMA/SMK sebanyak 70.724 atau sebesar 74,32%, dan Dosis II SMA/SMK sebanyak 27.245 atau sebesar 28,63%.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua kriteria, yaitu Level 2 dan Level 3. Adapun Kabupaten/Kota dengan kriteria tersebut, antara lain Level 2 Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Lamandau, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. Sementara Level 3, Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Timur. (din/nov).





GUBERNUR SUGIANTO SABRAN HADIRI MUSDA III DAD PROVINSI KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng di Rumah Betang Hapakat, Palangka Raya, Minggu (7/11/2021).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua DAD Periode 2016-2026 sekaligus untuk memilih Ketua DAD yang

baru. Musyawarah Daerah III DAD kali ini mengusung tema “Merajut Keberagaman Sesuai Falsafah Huma Betang Berlandaskan Kearifan Lokal dan Bingkai NKRI”.

Ketua Panitia Pelaksana Andre Elia dalam laporannya mengutarakan bahwa DAD Kalteng bersama dengan Ormas yang ada bahu membahu bekerja sama mempersiapkan Musda ini dengan harapan agar berlangsung dengan baik tanpa memandang suku, ras dan agama.

Sementara itu, H. Agustiar Sabran selaku Ketua DAD Kalteng menyampaikan bahwa acara Musda ini merupakan acara silaturahmi bagi masyarakat Kalteng sekaligus wadah bersama membicarakan masalah yang terjadi, sehingga mampu memberikan solusi agar tercipta perdamaian di Bumi Tambun Bungai dan Kalteng semakin Berkah.

Pada rapat pleno Musda III DAD Kalteng, Agustiar Sabran terpilih kembali sebagai Ketua Umum DAD Provinsi Kalteng untuk Periode 2021-2026 didampingi 5 anggota Tim Formatur lainnya.

Gubernur Sugianto Sabran dalam sambutannya berharap Ketua DAD yang terpilih mendukung pemerataan di Kalteng karena Dewan Adat Dayak adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun Bumi Tambun Bungai untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun bidang ekonomi.

Turut pula menghadiri kegiatan tersebut, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Pj. Sekda Nuryakin, Kepala Perangkat Daerah terkait, Ketua Batamad, Koordinator Damang dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng, serta Tokoh Agama, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat lainnya. (may/bow).





Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran meninjau langsung lokasi banjir serta menyambangi warga terdampak banjir di tenda pengungsian yang berada di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, (19/11/2021).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo hadir dalam acara Kenal Pamit Kapolda Kalteng, menandai pergantian pucuk pimpinan Kepala Kepolisian Daerah Kalteng dari Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada Irjen Pol Nanang Avianto. Acara berlangsung di Gedung Graha Bhayangkara Polda Kalteng, (12/11/2021).



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo foto bersama, usai menghadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, di Aula Jayang Tingang, Lantai 2 Kantor Gubernur, (25/11/2021).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HARI PAHLAWAN 2021

**PAHLAWANKU
INSPIRASIKU**

10 NOVEMBER 2021



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah

H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



<http://biroadpim.kalteng.go.id/>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/sekretariat.daerah.kalteng)



buletin.isenmulang@gmail.com